

102974

**Sastri Yunizarti Bakry & Media Sandra Kasih (editor). Menelusuri
Jejak Melayu-Minangkabau. Padang: Yayasan Citra Budaya
Indonesia, 2002**

KESADARAN IDENTITAS KEMELAYUAN MINANGKABAU DALAM GAGASAN KEPARIWISATAAN SUMATERA BARAT

Hasanuddin

I.

Kemajuan teknologi informasi dan transportasi mengakibatkan dunia tidak lagi terbatas. Mobilitas sosial yang tinggi sangat dimungkinkan. Informasi, investasi, industri, dan konsumsi, tidak lagi terikat oleh batas-batas teritorial geografis negara-bangsa. Itulah era yang disebut Kenichi Ohmae sebagai era "berakhirnya negara-bangsa" (Ohmae, 1996). Itulah era pasar bebas dan peradaban lintas batas.

Kemajuan IPTEK yang mengindikasikan kemajuan peradaban manusia, dan penerapannya telah mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat Eropa dan bangsa "Barat" lainnya. Berbeda dari negara-negara miskin dan terbelakang, yang masih "berkutut" dengan kebutuhan dasar (primer), kebutuhan tersier bagi mereka telah menjadi bagian yang krusial untuk dipenuhi. Kebutuhan akan rekreasi dan relaksasi menjadi agenda tahunan yang penting. Dengan begitu, *traveling* dan *tourism* menjadi suatu industri yang berkembang secara amat pesat.

Indonesia dan khususnya Sumatera Barat, sebagai bagian dari masyarakat dunia yang tak lagi terbatas, akan memperoleh bagian dari pembagian kue industri kepariwisataan itu, manis atau pun pahit. Manisnya, secara kuantitatif tentu bila dilihat dari sudut materialistik-ekonomik. Pahitnya akan dirasakan apabila transformasi masyarakat dan budaya yang ditimbulkan terjadi tanpa dasar dan prediksi, tanpa arah dan tujuan, dan sekonyong-konyong anak cucu eksis dengan kesadaran ketiadaan rujukan dan orientasi nilai dari budaya leluhurnya. Kehilangan identitas nilai budaya.

Keadaan tanpa identitas itu telah menjadi kekuatiran yang amat disadari. Kesadaran tersebut menuntut mereka untuk mendefinisi ulang diri dan mengidentifikasi tuntutan kebutuhan mereka secara material ataupun sosio kultural. Definisi diri dan identifikasi tuntutan sosial mereka tersebut merupakan strategi budaya dalam merencanakan, menjalani, dan menentukan arah transformasi masyarakat. Hal itu tercermin di dalam perilaku dan kebijakan yang ditempuh secara sosial atau politis; khususnya berkaitan dengan kepariwisataan.

Makalah ini memperlihatkan bagaimana pariwisata, di satu sisi, dipandang sebagai suatu sektor ekonomi potensial bagi Sumatera Barat, sementara di sisi lain dipandang sebagai sesuatu yang "mengancam" identitas budaya mereka. Dengan dasar itu, gagasan *clean tourism* sebagai *trade mark* kebijakan kepariwisataan Sumatera Barat, menunjukkan kesadaran identitas kemelayuan Minangkabau dalam menjalani proses transformasi.

II

Transformasi merupakan suatu konsep yang mengandaikan suatu proses pengalihan total dari suatu bentuk lama ke sosok baru yang akan mapan, atau diandaikan sebagai tahap akhir (sementara) dari suatu proses perubahan; yang berlangsung lama secara bertahap-tahap atau malah sebagai suatu titik balik yang cepat atau *abrupt* (Kayam, 1989:2).

Proses transformasi menurut Max Weber digerakkan oleh spirit internal atau motivasi budaya berupa "*ideal type*" yang sengaja diciptakan sebagai suatu model atau paradigma. Dengan itu, Weber menjelaskan bahwa transformasi masyarakat Eropa menjadi masyarakat kapitalis modern terjadi karena dorongan kuat "dari dalam" berupa spirit dari *protestan ethics* yang dikembangkan oleh Calvin. Calvinisme itulah yang menjadi suatu *weltanschauung*; suatu pandangan dunia; atau ideologi yang mendasari perubahan (Weber, 1958 dalam Budiman, 1995: 20-22). Sejalan dengan Weber, David McClelland berpendapat bahwa perubahan dan transformasi ditentukan oleh tinggi rendahnya *the need for achievement* (n-Ach) yaitu kebutuhan atau dorongan untuk berprestasi dari suatu masyarakat (McLelland, dalam Budiman, 1995:22-25).

Berbeda dengan Max Weber, Hegel; Durkheim; Marx; dan pengikut-pengikutnya seperti Coser dan Dahrendorf menjelaskan bahwa transformasi terjadi melalui proses dialektika. Menurut Hegel, proses dialektika (sebab-akibat atau selayaknya pertanyaan dan jawaban dalam percakapan) dan perkembangan pemikiran, sangat menentukan bagi perkembangan dalam sejarah masyarakat. Oleh karena itu, proses dialektika itu tidak hanya ada dalam pemikiran, akan tetapi juga dalam sejarah. Dalam proses itu, menurut tokoh idealisme historis dalam filsafat ini, setiap konsep atau fenomena akan menyebabkan terjadinya negasi atau kontradiksi, serta sintesis sebagai pemecahan terhadap kontradiksi itu tadi. Demikian seterusnya, suatu sintesis sebagai resolusi akan

menyebabkan terjadinya suatu kontradiksi yang baru lagi hingga transformasi akhir (Smith, 1987:77).

Marx memahami proses dialektika melalui proses pertentangan kelas dalam penguasaan alat produksi. Proses itu disebutnya sebagai suatu mekanisme perombakan masyarakat, yaitu mekanisme tesis-antitesis-sintesis (Soelaiman, 1998:64) untuk mengantarkan masyarakat sampai pada puncak transformasi dialektis berupa masyarakat tanpa kelas yang langgeng-abadi.

Di samping itu, Coser memahami transformasi melalui proses konflik dan konsensus, integrasi dan perpecahan (Polloma, 1994, 1994: 80-129). Demikian pula Dahrendorf (1986), yang memodifikasi teori Marx, menganggap masyarakat memiliki sisi ganda, yaitu: sisi konflik dan kerjasama, namun struktur kelas bukanlah sesederhana yang digambarkan Marx, yakni dualisme bourgeois (pemilik sarana produksi) dan proletariat (pekerja), tetapi lebih berhubungan dengan sistem pengendalian kekuasaan, yang mencakup hak absah untuk menguasai orang lain. (Dahrendorf, 1986; Polloma, 1994, op.cit.: 130-146).

Transformasi juga dapat diandaikan sebagai proses linear-hirarkhis ala Rostow: *The Stages of Economic Growth* (Rostow dalam Budiman, 1995 op.cit.), yang diadopsi oleh banyak dunia ketiga, termasuk Indonesia, namun gagal di tengah jalan ketika hendak mencapai tahap ketiga yakni masyarakat *take off* "tinggal landas". Atau berdasarkan pembabakan ahli masa depan Alvin Toffler melalui *The Three Waves*; melalui revolusi pertanian, revolusi industri, dan revolusi teknologi tinggi: teknologi informasi dan biologi (Toffler dalam Budiman, 1995 op.cit.).

Secara anonim orang Minangkabau juga telah mengandaikan suatu proses transformasi yang cenderung Hegelian sekaligus Weberian. Kemencakupan itu agaknya didasari sikap alamiah manusia Minangkabau yang "berguru kepada alam," sebagaimana filosofinya *alam takambang jadi guru*. Baginya, sesuai inspirasi alam, transformasi berlangsung melalui proses dialektik *basilang kayu dalam tungku baitu api mako ka iduik; bakarano-bakajadian* (Navis, 1984: 59-60), dan sekaligus melalui proses *patah tumbuhan hilang baganti* (Nasroen, 1971).

Konsep pertama mengandaikan bahwa transformasi diniscayakan terjadi melalui persaingan, perbedaan dan pertentangan, dan konflik-konflik kreatif, yang diharapkan akan membuahkan kompromi-kompromi ideal dan sintesis-sintesis kultural. Hal yang menjadi "spirit" (kebutuhan untuk berprestasi) bagi terjadinya persaingan dan konflik adalah konsep

"harga diri": dorongan untuk selalu mampu sama atau lebih dari orang lain, konsep yang mendasari filosofi hidup orang Minangkabau disamping konsep 'budi' (Nasroen, Op.cit.).

Konsep kedua mengandaikan bahwa transformasi itu diniscayakan sebagaimana patahan pada suatu tumbuhan, tunas baru yang serupa akan tumbuh pada batang yang patah tadi, dan tunas baru itu merupakan pengganti bagi tunas yang hilang karena patah tersebut. Tunas baru merupakan kontinuitas dari batang dan akar yang sama, namun sesungguhnya ia adalah sesuatu yang baru; yang secara implisit merupakan suatu perubahan pula. Artinya, dalam proses transformasi, perubahan diniscayakan terjadi (karena *sakali aie gadang sakali tapiian barubah*) namun perubahan itu mesti dalam koridor yang ada (*bakisa di lapiak sahala*). Artinya lagi, bagaimanapun perubahan mesti merupakan kontinuitas dari (didasari oleh) roh, spirit, dan nilai yang mengakar kukuh di bumi yang sama, yakni Minangkabau. Karena itu, meminjam konsep Taufik Abdullah, konflik dan sintesis membentuk pola sejarah seperti spiral (Abdullah, 1977:189).

Dengan kata lain, di satu sisi "kebudayaan Minangkabau memberi hidup akan adanya keberagaman cara berpikir di samping keberagaman yang bersifat sintesis (Naim, 1983), dan secara bersamaan, secara kultural filosofis adat Minangkabau mendorong terjadinya perubahan ke kemajuan, dan sekaligus memberi kontrol bagi sejauh mana perubahan itu mesti dilakukan (Abdullah dalam Navis, 1984: i-ix).

III

Para pendahulu Minangkabau telah secara arif dan kreatif mencipta dan memelihara keberlangsungan proses transformasi masyarakat dan kebudayaannya. Transformasi fundamental yang terjadi adalah melalui proses dialektika adat dan Islam. Sekalipun proses itu ditandai dengan konflik yang bermuara menjadi Perang Paderi (1821-1837), namun episode yang terpenting dari proses tersebut adalah ketika Belanda belum campur tangan, yaitu sewaktu orang Minangkabau harus berhadapan dengan diri dan tradisinya sendiri (Schrieke, 1973). Konflik dialektik itu yang membuahkan integrasi adat dan Islam, yang dieksplicitkan dalam ungkapan *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*. Sekalipun masih aktual untuk diperdebatkan apakah *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* itu sebuah konsep yang dapat ditemui rujukannya konkritnya dalam setiap sikap dan perilaku masyarakat

Minangkabau, namun itu merupakan *ideal type* dalam melakukan pembaharuan masyarakat.

Secara konkrit pada masa itu, integrasi keduanya telah memberikan bekas, dengan duduknya ulama Islam dalam struktur pemerintahan, baik di pusat kerajaan ataupun di tingkat *nagari*. Pada pusat kerajaan, ulama duduk sebagai Raja Ibadat, yaitu raja yang berkedudukan setara dengan Raja Adat dan Raja Alam. Ketiga unsur pimpinan tertinggi tersebut secara agregatif disebut sebagai *tungku nan tigo sajarangan* (tungku nan tiga sejarangan). Dalam lembaga parlemen yang dikenal dengan sebutan *basa ampek balai* (empat orang pembesar perwakilan), ulama duduk dengan sebutan *Tuan Kadhi* (pembesar keagamaan), yang kedudukannya sama dengan *Andomo* (pembesar pemerintahan), *bandaharo* (pembesar perbendaharaan), dan *mangkudum* (pembesar keamanan). Sementara itu, di tingkat *nagari* ulama duduk dalam kepemimpinan kolektif yang disebut dengan *urang ampek jinih* (orang yang empat jenis), dengan sebutan *malin* (mualim atau kiai). Kedudukannya sama dengan *manti* (administrator), *dubalang* (hulubalang), dan *punggawa* (pegawai).

Transformasi dalam sistem pendidikan, yang semula berbasis pada *surau*, telah pula dilakukan oleh tiga orang Haji murid Syekh Ahmad Khatib dari Makkah, yaitu: Haji Abdul Karim Amrullah, Haji Abdullah Ahmad, dan Haji Jamil Jambek. Upaya pencarian kompromi antara adat dan ajaran Islam, terutama dalam sektor pendidikan, telah mengangkat harkat para ulama setaraf dengan kaum 'elite baru' yang memperoleh pendidikan Belanda. Sistem pendidikan *surau* mereka kembangkan menjadi sistem pendidikan madrasah. Sistem pendidikan itu mereka kembangkan pada tiga perguruan yang didirikan pada tahun 1915, yaitu Sumatra Thawalib (sekolah khusus putra) dan Diniyah Putri (sekolah khusus putri) di Padang Panjang, serta Adabiyah di Padang.

IV

Kepariwisataan adalah salah satu produk dari globalisasi, yang di samping menimbulkan kegamangan ia sekaligus memberi ruang pula bagi harapan, karena potensinya secara ekonomis. Alam dan kebudayaan Minangkabau begitu eksotik dan merupakan aset pariwisata yang tak ternilai. Hal itu diharapkan dapat menjadi jalan keluar bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, demi kemandirian daerah sebagai-

mana dituntut oleh semangat otonomi daerah, karena ketersediaan sumberdaya alam yang dimiliki terbatas untuk dieksploitasi.

Pariwisata merupakan industri terbesar dunia yang tumbuh secara amat pesat. Pada tahun 1992 (sepuluh tahun yang lalu, sekalipun data lama tapi tetap akurat dan belum dipengaruhi isu ancaman teroris internasional Osama bin Laden pasca tragedi WTC) saja, industri ini telah menghasilkan *gross out put* 3,5 triliun USD atau lebih dari 12 persen dari seluruh pengeluaran konsumen. Pariwisata dan travel juga memasok hampir 130 juta lapangan pekerjaan atau menyerap hampir 7 persen dari seluruh tenaga kerja. Oleh karena itu, kepariwisataan merupakan *leading industries contributor* terhadap GNP, yakni lebih dari 6 persen, dan dengan investasi melebihi 422 milyar USD. Kontribusi pariwisata dan travel tersebut, baik secara langsung atau tidak langsung, atau melalui pajak perseorangan, secara kuantitatif mencapai 400 milyar USD setiap tahun (Theobald, 1994: 3-4).

Kontribusi kepariwisataan Indonesia terhadap penerimaan devisa tercatat 523,3 juta USD pada tahun 1985, meningkat menjadi 2.105,3 juta USD pada tahun 1990, dan 5.228,3 juta USD pada tahun 1995. Angka tersebut diprediksi akan meningkat terus menjadi 15 milyar USD pada tahun 2005, dengan jumlah kedatangan wisatawan mancanegara sebanyak 11,1 juta orang, dan dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 12,23 persen per tahun (Diparda, 1996). Apabila pada periode 1985-1995 sektor pariwisata menempati urutan ke empat dalam distribusi kontribusi terhadap devisa negara (setelah migas, kayu lapis, dan tekstil), maka pada tahun 2005 sektor ini diproyeksikan akan menduduki urutan pertama menggantikan migas. Kepariwisataan akan menjadi andalan utama, dan Indonesia pada tahun itu diprediksikan akan menduduki urutan kedua setelah Australia dalam laju perkembangan kepariwisataan di Asia pasifik (Kompas, 1996:3 Oktober).

Perkembangan spektakuler industri pariwisata itu amat didukung oleh berbagai faktor, antara lain (1) aksesibilitas ke berbagai negara dan kawasan dunia, yang didukung oleh teknologi transportasi dan terpeliharanya secara relatif keamanan dan perdamaian dunia. (2) peningkatan kesejahteraan masyarakat dunia (meningkatnya pendapatan dan kebutuhan konsumsi bukan makanan, terutama kebutuhan rekreatif), sehingga memungkinkan bagi sebagian mereka untuk melakukan perjalanan wisata. (3) tersedianya faktor-faktor pendukung industri pariwisata tersebut, misalnya adanya *input* (objek dan daya tarik pariwisata), sarana infra-

struktur (transportasi, akomodasi, dan konsumsi), sumber daya manusia pengelola yang profesional; dan *output* berupa *benefit product* secara material atau moral spiritual, baik bagi wisatawan maupun bagi masyarakat setempat.

Pariwisata juga amat ditentukan perkembangannya pada suatu wilayah atau kawasan oleh sikap budaya (yang mendasari perilaku budaya) masyarakat pada wilayah atau kawasan tersebut. Hal itu mengindikasikan bahwa industri pariwisata atau kepariwisataan memiliki implikasi dan dependensi secara lintas sektoral. Masing-masing faktor dan sektor memiliki andil dan kontribusi bagi berkembang atau tidaknya suatu industri pariwisata pada suatu wilayah atau kawasan.

Secara ekonomis, pariwisata (internasional atau domestik) adalah industri yang sangat potensial, sebagaimana terlihat pada deskripsi di atas. Pariwisata tidak saja penghasil devisa, akan tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan daerah, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, dan memberdayakan serta meningkatkan taraf perekonomian masyarakat daerah tujuan wisata setempat. Oleh karena itu, aspek-aspek ekonomis pariwisata menjadi fokus utama dalam penelaahan-penelaahan awal mengenai dampak pariwisata. Hal itu, menurut Cooper dan Archer, tidak semata-mata disebabkan oleh dampak ekonomis pariwisata lebih terukur dan terbaca secara kuantitatif, akan tetapi lebih diwarnai oleh optimisme bahwa studi tersebut akan memperlihatkan bahwa manfaat ekonomik pariwisata tertuju bagi masyarakat daerah tujuan wisata setempat (Cooper dan Archer dalam Theobald ed. 1994: 73-91).

Tentu saja pariwisata tidak semestinya dilihat semata-mata dari perspektif ekonomis. Pariwisata, di samping memiliki dampak positif secara ekonomis, ia juga menimbulkan berbagai tipe konsekuensi terhadap lingkungan dan sosio-kultural, yang seringkali tidak ternilai secara kuantitatif ekonomis. Pariwisata dalam perspektif kultural-etik cenderung memiliki dampak negatif. Menurut Koentjaraningrat, kepariwisataan tidak saja dapat menimbulkan "kerusakan" kebudayaan, akan tetapi juga "kerusakan" lingkungan, membahayakan keamanan, dan penyebaran penyakit (Kompas, 1993). Pembangunan dan pengembangan pariwisata di Hawaii, misalnya, telah menimbulkan konsekuensi seperti yang telah digambarkan Rohter sebagai "*a concrete jungle, a raucous sideshow, . . . a billion dollar mistakes*". Pariwisata di Hawaii telah menimbulkan langka dan mahalanya perumahan, polusi air dan udara, keringnya sungai, erosi

nilai tradisional, terganggunya masyarakat setempat oleh kebisingan pantai; lalu lintas; sampah dan kotoran, dan fakta demikian tidak henti-hentinya merusak pemandangan (Rohter, 1992).

Dampak sosio-kultural pariwisata seringkali dianggap sebagai akibat dari interaksi intensif antara *host-guest*. Namun, pengaruh di luar interaksi langsung tersebut justru lebih penting, karena mampu menyebabkan restrukturisasi pada berbagai bentuk hubungan di tengah masyarakat (Wood, 1984).

Dampak pariwisata terhadap kelompok sosial yang berbeda juga tidak selalu sama (bisa bertolak belakang), dan dipahami secara berbeda pula oleh kelompok orang dengan latar belakang sosio-kultural yang berlainan. Kekhawatiran masyarakat Bali terhadap "kehancuran" budaya mereka akibat pariwisata, misalnya, ternyata setelah puluhan tahun tidak terbukti (Sumardjan, 1987). Dampak negatif pariwisata hanya pada "kulit luar", tidak menyentuh kepada "inti" kebudayaan Bali (Astika, 1991; Mantra, 1990). Bahkan pada beberapa aspek, pariwisata dapat dikatakan sebagai pemerkokoh kebudayaan Bali. Perubahan yang terjadi masih tetap berada pada arus keberlanjutannya (Pitana, 1992).

Sekalipun demikian, dalam perspektif masyarakat Minangkabau Sumatera Barat, pariwisata cenderung sebagai sesuatu yang berpotensi destruktif terhadap sosio-kultural. Pariwisata dianggap sebagai sesuatu yang identik dengan maksiat, dan maksiat dianggap sebagai "virus" bagi kehidupan sosio-kultural mereka yang berlandaskan adat dan syarak (Islam). Bukankah citra kepariwisataan identik dengan 4S: *sea-sun-sand-sex* (tidak bebas dari nuansa eksploitasi seksual secara bebas)?

V

Menyikapi kegamangan di atas, pada dasarnya strategi transformasi para intelektual hebat Minangkabau masa lalu dapat digunakan secara kritis. Kehadiran dua persoalan, yakni globalisasi dengan segala ikutannya (teknologi, informasi, *tourism*, dan pasar bebas) dan otonomi daerah (tepatnya semangat yang didasari kesadaran revitalisasi nilai keminangkabauan) secara bersamaan, merupakan sebuah anugerah. Sebab, yang satu dapat ditempatkan sebagai negasi terhadap yang lain. Dalam logika dialektika, satu pihak tidak lebih penting dari yang lain, melainkan keduanya fungsional bagi transformasi yang bersifat sintesis.

Bahkan, dalam kacamata pariwisata budaya, program 'otonomi daerah' dengan gerakan kultural konkrit berupa restrukturisasi sosial dan revitalisasi kultural yang terangkum dalam program *kembali ke nagari* secara fundamental ataupun adaptif, justru membentuk bangunan yang sinergis. Di satu sisi kita menata kembali 'profil' kehidupan *bernagari* yang khas, sementara di sisi lain, kekhasan itu merupakan aset sebagai daya tarik pariwisata budaya.

Pengembangan kepariwisataan Sumatera Barat oleh Pemerintah Daerah merupakan alternatif yang didasari oleh fakta bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat lebih rendah daripada Riau, Sumatera Utara, dan Aceh, apabila dilihat dari nilai PDRB. Bahkan PDRB per kapita Sumatera Barat lebih rendah dibandingkan nilai PDB perkapita nasional. Kontributor terbesar terhadap PDRB Sumatera Barat itu adalah sektor pertanian, yakni 20,78 % pada tahun 1995 dan 20,81 % pada tahun 1996, dan sektor ini juga penyerap tenaga kerja paling besar (50% lebih). (Hasil Susenas 1995 dan 1996, BPS Sumbar 1996). Namun, dari luas daratan Sumatera Barat yang mencapai 42.297,30 Km² (sama dengan 2,17 persen dari luas daratan Indonesia yang luasnya 1,9 juta Km²), hanya sekitar 13 persen saja yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya pertanian (Diparda Sumbar, 1996b).

Di samping itu, kontribusi PAD terhadap APBD masih lebih rendah daripada kontribusi subsidi (sumbangan dan bantuan) pemerintah pusat. APBD tahun anggaran 1996/1997 memperlihatkan kontribusi PAD adalah Rp 60.360.923.237,00 (36,12%) terhadap total APBD yang berjumlah Rp 167.117.205.095,00, sedangkan kontribusi subsidi pemerintah pusat adalah Rp 73.772.189.124,00 (44,1%) (Dispenda Tk.I Sumatera Barat, 1997).

Kepariwisataan diharapkan merupakan alternatif pemecahan masalah keterbatasan sumber daya alam Sumatera Barat dan rendahnya tingkat kesejahteraan ekonominya. Namun terdapat pro dan kontra terhadap pariwisata sebagai alternatif ekonomi. Di satu pihak, pariwisata dianggap sebagai pilihan utama atas dasar fakta-fakta kondisional Sumatera Barat di atas, tetapi di pihak lain, pariwisata dipandang sebagai pilihan yang keliru karena memiliki konsekuensi negatif terhadap sosio-kultural masyarakat dan lingkungan. Golongan terakhir memandang bahwa banyak sektor ekonomi alternatif yang bebas dari konsekuensi sebesar yang dikandung pariwisata, *merantau* misalnya.

Secara historis, menurut golongan ini, masyarakat Minangkabau sangat kreatif dan elastis dalam melewati tantangan kebijakan ekonomi kolonial. Mereka memperoleh keuntungan luar biasa dari kebijakan *cultuurstelsel* (1847-1908), karena kreatif membangun relasi dagang dengan Singapura melalui pantai timur yang bebas dari pengawasan Belanda. Sementara dengan kebijakan yang sama, petani Jawa begitu menderita dalam kerawanan ekonomi subsistensi dengan cara *shared poverty* (kemiskinan yang dipikul bersama), sebagaimana digambarkan Geertz (1963) sebagai *involusi pertanian*. Transformasi ekonomi dapat mereka jalani dengan cerdas.

Kegamangan terbesar menyikapi kebijakan kepariwisataan Sumatera Barat adalah ketakutan orang Minang kehilangan identitas keminangkabauannya: baik material maupun moral. Tiga hal yang mendasari kegamangan tersebut, yaitu: (1) citra dan identifikasi pariwisata sebagai maksiat (dengan indikator buka aurat, pergaulan bebas, narkoba, dan kejahatan lainnya), (2) polusi sosial di kampung halaman, karena sebagian besar dihuni orang-orang yang lemah (kanak-kanak dan wanita) sedang yang kuat dan pintar *merantau*, dan (3) asset bersama suatu kaum sebagai identitas komunal, seperti "tanah pusaka atau ulayat", akan diambil alih oleh investor.

Gagasan kebijakan *clean tourism* di Minangkabau memiliki implikasi budaya yang mengakar pada budaya Melayu dan Islam. *Clean tourism* dinyatakan sebagai konsep yang menyaratkan bahwa kepariwisataan yang dikembangkan di Minangkabau mestilah pariwisata bersih, tidak seja secara fisik tetapi juga etik: steril secara higienik dari kuman patologis dan juga steril secara moral dari maksiat.

VI

Clean tourism adalah konsep kepariwisataan yang mengandung pengertian bahwa pariwisata Sumatera Barat bebas maksiat. Pariwisata yang bebas dari perilaku berpakaian minim dan tidak menutup aurat, bersih dari pergaulan seksual bebas, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, narkoba, judi, kejahatan, dll. Untuk itu produk yang akan ditawarkan adalah pariwisata alam dan pariwisata budaya. Demi mempertimbangkan perbedaan budaya yang mencolok antara bangsa timur dan bangsa barat, maka pemasaran pariwisata Sumatera Barat ditujukan ke negara-negara dengan bangsa serumpun: Melayu (Malaysia dan Brunei), dan Islam (Timur Tengah).

Persoalannya adalah, apakah dengan begitu Sumatera Barat akan menolak wisatawan Eropa yang memiliki tradisi berpakaian minim? Atau wisatawan itu yang dipaksa berbaju kurung dan memakai jilbab? Lalu bagaimana dengan strategi pemasaran yang menjadi bagian dari strategi bisnis dengan orientasi keuntungan yang sebesar-besarnya? Bagaimana pula menjadikan eksklusifitas daerah dalam tataran global dengan kebijakan pasar bebas dan peradaban lintas batas?

Agaknya masyarakat Minangkabau sadar bahwa wisatawan memiliki kedudukan ganda secara sekaligus, yaitu sebagai tamu dan sebagai raja. Sebagai tamu, wisatawan seyogianya berperilaku sesuai dengan adat dan budaya yang dimiliki tuan rumah, sesuai dengan konsep *dimana bumi di pijak di situ langit di junjung*. Penghormatan terhadap tamu didasarkan kepada penghormatan tamu tersebut kepada adat dan budaya tuan rumah tersebut. Namun sebagai raja, didasarkan atas kedudukan *pembeli adalah raja*, maka kebebasan wisatawan justru seyogianya dihormati. Maka memilih sasaran dalam pemasaran, bangsa serumpun dan Islam, adalah strategi meminimalisasi dampak negatif secara kultural-etik.

Kebijakan *clean tourism* dapat dilihat sebagai sebuah alternatif kompromistik terhadap dikotomi-dikotomi yang mewarnainya. Kompromi antara idealitas budaya dengan tuntutan material ekonomi, antara idealisme lokalisasi (otonomi daerah dan program kembali *banagari*) dengan realitas faktual globalisasi. Namun, negasi-negasi, perdebatan, dan konflik lanjut mesti diciptakan secara kreatif, sehingga kebijakan tersebut bukan sekadar suatu bentuk kompromistik tetapi mesti **sintetik kultural**.

VII

Simpulan dari uraian di atas adalah:

1. Pariwisata tumbuh subur karena difasilitasi oleh IPTEK, kebijakan multi nasional "pasar bebas", dan tuntutan dari dalam: maju setaraf dengan bangsa lain, dalam tataran global.
2. Kebijakan pengembangan sektor pariwisata di Sumatera Barat didasari oleh tuntutan peningkatan taraf kesejahteraan ekonomi masyarakat yang rendah dan keterbatasan daya dukung sumber daya alam untuk dieksplotasi.

3. Kebijakan tersebut tidak bebas konflik, karena di samping potensinya secara konstruktif-ekonomik, pariwisata juga memiliki potensi destruktif secara etik.
4. Kebijakan *clean tourism* (pariwisata bebas maksiat dengan pasar utama negara-negara serumpun: Melayu dan Islam) lahir dari **kesadaran identitas kemelayuan Minangkabau**, dan merupakan suatu bentuk konformitas dalam dikotomi potensi yang dikandung oleh pariwisata itu.
5. *Clean tourism* sebagai suatu bentuk konformitas memerlukan penggiringan transformatif lebih lanjut, melalui konflik-konflik kreatif demi membuahkan kebijakan kepariwisataan sebagai sintetik-kultural.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik. 1971. "Modernization in the Minangkabau World: West Sumatera in the Early Decades of Twentieth Century." *Culture and Politics in Indonesia*. Ed. Claire Holt. Ethaca and London: Cornell University Press.
- Abdullah, Taufik. 1984. "Studi Adat Sebagai Pantulan Perubahan Sosial di Minangkabau". *Alam Terkembang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. A.A. Navis. Jakarta: Grafitipers.
- Astika, Ketut Sudana. 1992. "Bali dalam Sentuhan Pariwisata." Working Paper project Comprehensive Tourism Development Plan for Bali. Denpasar.
- Biro Pusat Statistik. 1996. *Survei Sosial Ekonomi Nasional*.
- Budiman, Arief. 1995. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Cooper, Chris dan Brian Archer. 1994. "The Positive and Negative Impacts of Tourism." *Global Tourism, The Next Decade*. Ed. Theobald. Oxford: Butterworth-Heinemann.

- Coser, Lewis A. 1975. "Structure and Conflict." *Approach to Study of Social Structure*. Ed. Peter M. Blau. New York: The Free Press.
- Dahrendorf, Ralf. 1986. *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri, Suatu Analisis Kritis*. Edisi Indonesia. Jakarta: Rajawali.
- Diparda I Sumbar. 1996a. "*Perkembangan Pariwisata Internasional*". Padang: Kantor Diparda Propinsi.
- Diparda I Sumatera Barat. 1996b. *Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Sumatera Barat 1996-2010. Perda No.7 Thn 1996*. Padang: Kantor Diparda Propinsi.
- Dispenda Tk.I Sumatera Barat. 1997. *Perkembangan Pendapatan Daerah Sumatera Barat Selama 5 Tahun (1992/1993-1996/1997)*. Padang: Kantor Dispenda Propinsi.
- Gertz, Clifford. 1963. *Involusi Pertanian, Proses Perubahan Ekologis di Indonesia*. (terj. Soepomo). Jakarta: Bhatara K.A.
- Hasanuddin. 2000. "*Clean Tourism, Konflik, dan Konformitas; Fenomena Kepariwisata di Sumatera Barat*" *DIALOG: Jurnal Internasional Kajian Budaya*. Denpasar (v.1 No.1 Januari).
- Kayam, Umar. 1989. *Transformasi Budaya Kita*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Fakultas Sastra UGM. Yogyakarta.
- Kompas. 1996. "Pariwisata, Devisa Utama Tahun 2000". (3 Oktober).
- Mantra, I.B. 1990. "Dampak Industri Pariwisata terhadap Kehidupan Sosial Budaya di Ubud Bali." *Bali Sustainable Development Project*. Denpasar.
- Naim, Mochtar. 1983. "Minangkabau dalam Dialektika Kebudayaan Nusantara". *Dialektika Minangkabau dalam Kemelut Sosial Politik*. Ed. A.A. Navis. Padang: Genta Singgalang.

- Naim, Mochtar. 1984. *Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Yogyakarta: Gadjahmada University Press.
- Nasroen, M. 1971. *Dasar-Dasar Filsafat Adat Minangkabau*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Navis, A.A. 1984. *Alam Berkembang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Grafitipers.
- Kenichi Ohmae. 1996. "Berakhirnya Negara-Bangsa." *Analisis CSIS*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies. (Thn. XXV, No.2. Hal. 119-135).
- Pitana, I Gde. 1992. "Daya Dukung bali terhadap Kepariwisata dan Sosial Budaya." *Majalah Ilmiah Universitas Udayana* (terbitan khusus). Denpasar: Pusat Penelitian Universitas Udayana.
- Polloma, Margaret M. 1994. *Sosiologi Kontemporer*. Edisi Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rohter. 1992. *A Green Hawaii*. Honolulu: O KaMalo Press.
- Schrieke, B.J.O. 1973. *Pergolakan Agama di Sumatera Barat, Sebuah Sumbangan Bibliografi*. Jakarta: Bhratara.
- Smith, Charlotter. 1987. *Macmillan Dictionary of Anthropology*. London: Macmillan Press Ltd.
- Soelaiman, M. Munandar. 1998. *Dinamika Masyarakat Transisi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soemardjan, Selo. 1997. "Hubungan Pariwisata, Kebudayaan, dan Masyarakat." *Menuju Terbentuknya Ilmu Pariwisata di Indonesia*. Ed. I.G.N. Bagus. Denpasar: Program Studi Magister (S2) Kajian Budaya Universitas Udayana.

- Theobald, William F. 1994. "The Context, Meaning, and Scope of Tourism." *Global Tourism, the Next Decade*. Theobald. Oxford: Butterworth-Heinemann.
- Wood, R.E. 1984. "*International Tourism and Cultural Change in Southeast Asia, Economic Development and Cultural Change*." 23/3: 561-581.